

2022



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAPPEDA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Alamat : Jl Wolter Monginsidi Telp (0541) 6669139
Fax (0541) 6669149
Website: www.bappeda.kutaikartanegarakab.go.id
Email: bappeda@kutaikartanegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dapat diselesaikan. RKT tahun 2021 merupakan penjabaran dari aktivitas selama tahun Anggaran dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini, berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2021, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2021 dengan baik.

Tenggarong, Juli 2021
KEPALA,

WIYONO,S.IP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690204 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	3
BAB II.....	5
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA.....	5
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	5
2.1. RENCANA STRATEGIS	5
2.2. TUJUAN DAN SASARAN	5
2.1. RENCANA KINERJA	8
BAB III.....	18
PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026	7
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tahun 2022	8
Tabel 3. Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini disusun mengacu berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah, dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

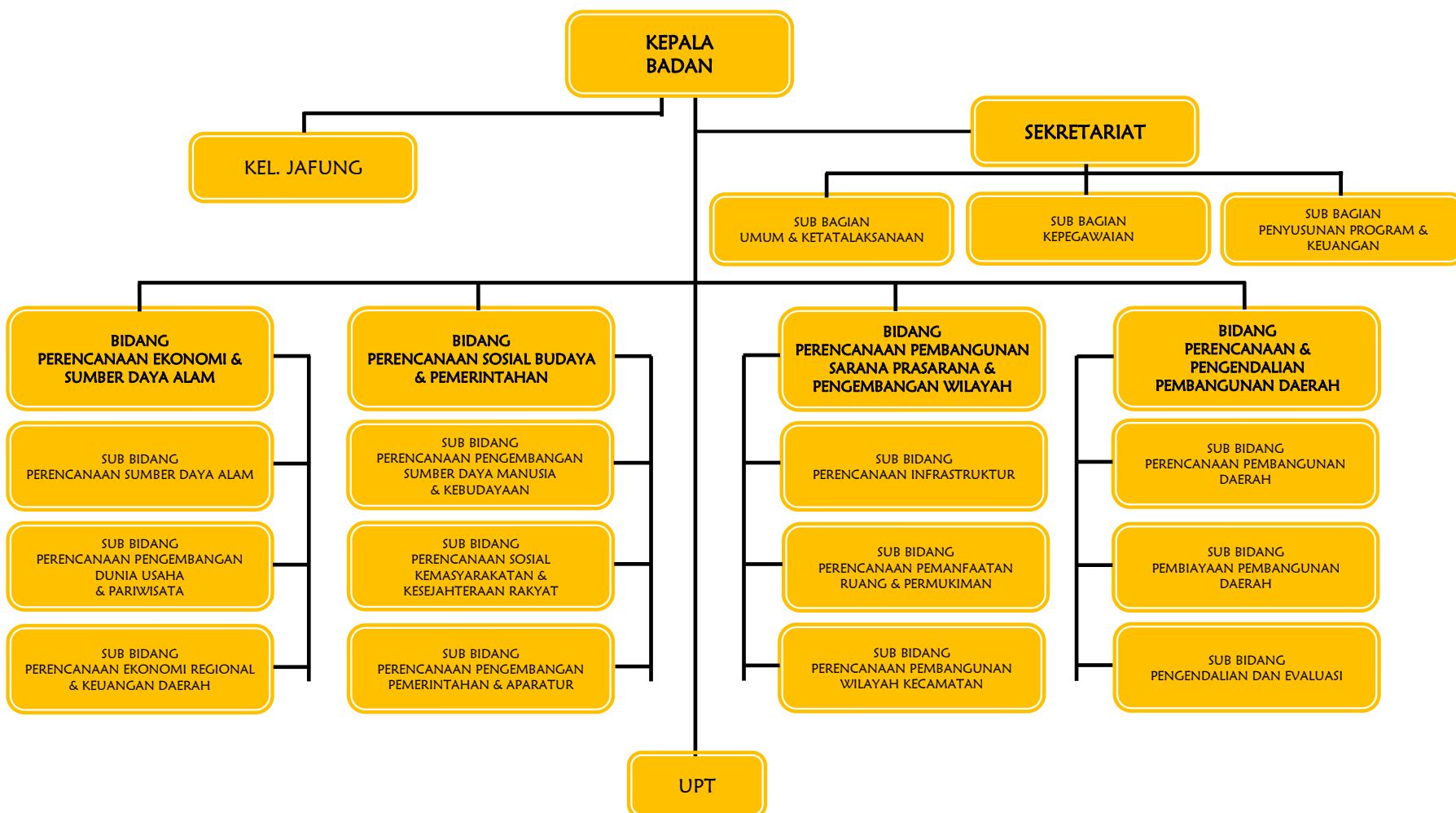
- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pemantauan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Susunan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan:
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam membawahkan:
 - Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, dan Pariwisata;
 - Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah;
4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahkan:
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kebudayaan;
 - Sub Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur;
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah:
 - Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah;
 - Sub Bidang Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;
6. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah membawahkan:
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);



Sumber: Struktur Organisasi BAPPEDA Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016

BAB II

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021.

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sesuai dengan Misi ke-1 yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 yaitu “ **Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani**” yang kemudian diturunkan dalam Tujuan

meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dalam 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP kabupaten.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks persepsi kualitas pelayanan publik.

Maka pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2022, dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai dengan sasaran ke-1 RPJMD dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Rata-rata capaian indikator tujuan daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD maka dilakukan perumusan perencanaan terintegrasi yang tergambar dalam logical framework sebagai berikut:

Gambar 1. Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2022, sebagai berikut:

**“Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian
Pembangunan Daerah”**

Tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2022 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
2021-2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	75	85	87	90	93	Indikator Tujuan
	1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,200 (1)	2,300 (1)	2,400 (1)	2,500 (1)	2,600 (1)	Indikator Kinerja Utama
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	94.00	95.00	96.00	96.50	97,00	Indikator Kinerja Utama

2.1. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabara dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam rencana kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2022.

Rencana kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana yang terbatas. Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tahun 2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	75	Indikator Tujuan
	1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,200 (1)	Indikator Kinerja Utama
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	94.00	Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai LKjIP	Nilai/Peringkat	87 (A)	24,999,174,778
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	12	550,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	5	250,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	4	50,000,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	2	150,000,000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen	1	100,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	dokumen	5	17,042,630,290
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	Bulan	12	16,708,770,490
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	5	308,859,800
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	25,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen	3	250,000,000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD (Masa Ekonomis)	dokumen	1	50,000,000
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi BMD	dokumen	1	50,000,000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen BMD Perangkat Daerah	dokumen	1	50,000,000
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	2	100,000,000
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	1	650,000,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Stel	145	150,000,000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Kepegawaian (DUK,KGB,Kenaikan Pangkat,Pensiun)	dokumen	4	25,000,000
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen	dokumen	1	75,000,000
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN	ASN	16	-
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN	ASN	50	400,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	9	1,800,000,000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik	Jenis	2	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	Jenis	48	200,000,000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	Jenis	9	450,000,000
		Jumlah kotak makanan dan minuman rapat yang disediakan	Kotak	3,350	
		Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan	Kotak	2,090	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan	Eksemplar	1,013	100,000,000
		Jumlah Cetakan Kalender	Buah	174	
		Jumlah penggandaan	Lembar	50,130	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	Eksemplar	2,493	100,000,000
		Jumlah kontrak advetorial	Advetorial	2	
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Jenis	15	50,000,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Orang/Kali	150	700,000,000
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)	Berkas	65	100,000,000
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi	Aplikasi	3	100,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	582,628,036
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jenis	2	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	18	582,628,036
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	1	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	2,272,313,550
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	1,521,900,000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	Bulan	12	750,413,550
		Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	%	100	1,851,602,902
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	15	354,502,820
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	6	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	25	233,002,620
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	3	
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang dipelihara kantor	Jenis	3	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan pemeliharaan gedung kantor	Kali	36	544,668,802
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kali	132	719,428,660
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	%	100	4,162,400,000
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen	dokumen	22	1,825,000,000
		Jumlah OPD	OPD	58	
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	2	
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum	3	
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali	2	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	1 dokumen	300,000,000
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	dokumen	1 dokumen	400,000,000
		Jumlah Pendampingan Perencanaan	OPD	58	
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik	even	1	90,000,000
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	even	3	45,000,000
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang	even	2	90,000,000
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen	dokumen	18	200,000,000
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RKPD dan Perubahan RKPD)	dokumen	2	700,000,000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	dokumen	4	1,434,900,000
		Jumlah pendampingan ketersediaan data	urusan	32	
		Jumlah Pusat layanan data dan informasi	Pusat layanan data dan informasi	1	
		Jumlah Regulasi Daerah	Regulasi	1	
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	30	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data Kemiskinan	dokumen	1	802,500,000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
		Jumlah dokumen (data bidang perencanaan)	dokumen	3	
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pendampingan ketersediaan data (32 urusan)	urusan	32	530,000,000
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	30	
		Jumlah Pusat Layanan Data dan Informasi	Pusat Data	1	
		Jumlah Regulasi Daerah	Regulasi	1	
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	dokumen	1	102,400,000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	13	902,500,000
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian	Dokumen	8	202,500,000
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen pengendalian	Dokumen	1	-
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Dokumen	4	700,000,000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	%	100	2,996,749,440
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	%	100	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	%	100	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	27	1,236,750,000
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	13	115,000,000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	dokumen	13	100,000,000
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	1	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	dokumen	13	70,000,000
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	dokumen	1	250,000,000
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	12	236,750,000
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	dokumen	12	100,000,000
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	1	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	dokumen	12	115,000,000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	dokumen	1	250,000,000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	13	880,000,000
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	6	67,500,000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	dokumen	6	100,000,000
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	1	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	dokumen	6	200,000,000
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	dokumen	1	33,750,000
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	5	90,000,000
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	dokumen	5	100,000,000
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	1	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	dokumen	5	255,000,000
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	dokumen	1	33,750,000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	25	879,999,440
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	5	45,000,000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	dokumen	5	100,000,000
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	1	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	dokumen	5	249,999,620
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	dokumen	1	45,000,000
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	18	45,000,000
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	dokumen	18	100,000,000
		Jumlah Mou dengan perguruan tinggi	dokumen	1	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	dokumen	18	249,999,820
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	dokumen	1	45,000,000
					32,158,324,218

BAB III

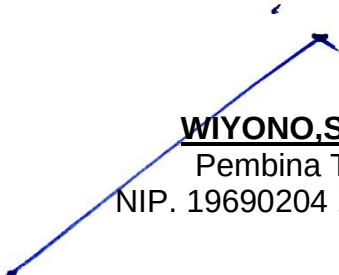
PENUTUP

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tujuan dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana strategis 2021–2026 yang sifatnya tahunan, memuat sasaran, program / kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini merupakan komitmen Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021.

Tenggarong, Juli 2021
KEPALA,


WIYONO, S.IP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690204 199003 1 009